

LAPORAN AKHIR MAGANG
ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PENGUKURAN
KINERJA KEUANGAN DI BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
ALAM SETDA DIY TAHUN ANGGARAN 2022-2024



Disusun Oleh :

Fatma Farikah

(22312276)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fatma Farikah
NIM : 22312276
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam
Indonesia
Judul : Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk
Pengukuran Kinerja Keuangan di Biro
Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
DIY Tahun Anggaran 2022-2024

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Laporan akhir magang berikut adalah hasil karya penulisan saya sendiri tanpa ada campur tangan oleh pihak lain, selain pembimbing dan narasumber terkait.
- 2) Laporan akhir magang ini secara keseluruhan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun baik pada Universitas Islam Indonesia, ataupun pada perguruan tinggi lainnya.
- 3) Dalam laporan akhir magang ini tidak ditemui karya tulis atau pendapat yang telah diklaim oleh orang lain kecuali telah dicantumkan selaku rujukan dalam penulisan laporan serta tercantum pada daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Maret 2026



Fatma Farikah

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR MAGANG
BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA DIY

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PENGUKURAN
KINERJA KEUANGAN DI BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SETDA DIY TAHUN ANGGARAN 2022-2024

Disusun Oleh :

Fatma Farikah

(22312276)

Disahkan oleh,

Yogyakarta, 14 Maret 2026



Dosen Pembimbing

(Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA)



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Aca Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Cendong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. lib@uii.ac.id
W. lib.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MAGANG

Nomor: 098/Ka.ProdiAkt/10/Prodi.Ak/UM/IV/2026

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2025/2026, hari Kamis, tanggal 23 April 2026, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir yang disusun oleh:

Nama : FATMA FARIKAH
NIM : 22312276
Judul Tugas Akhir : Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Pengukuran Kinerja Keuangan di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun Anggaran 2022-2024
Dosen Pembimbing : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Magang) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A-
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.
Anggota Tim : Marfuah, Dra., M.Si

Yogyakarta, 23 April 2026

Ketua Program Studi Akuntansi,



Prof. Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS
NIK. 033120104

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/MAGANG

MAGANG BERJUDUL

Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Pengukuran Kinerja Keuangan di Biro Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Setda DIY Tahun Anggaran 2022-2024

Disusun oleh : FATMA FARIKAH

Nomor Mahasiswa : 22312276

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 23 April 2026

Penguji/Pembimbing Magang : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.

Penguji : Marfuah, Dra., M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang yang berjudul **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Pengukuran Kinerja Keuangan di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun Anggaran 2022-2024”** dengan baik. Penulisan laporan akhir magang ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan laporan akhir magang ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyadari keberhasilan dalam penyusunan laporan magang ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat, serta kesehatan sehingga penulis dapat menulis, menyusun, dan menyelesaikan laporan akhir magang ini hingga selesai.
- 2) Kedua orang tua dan keluarga saya, yang selalu mendoakan, menafkahi serta memberi dukungan dan memberi semangat selama penulis menyusun laporan akhir magang.
- 3) Segenap Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
- 4) Ibu Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan laporan akhir magang ini.
- 5) Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang serta menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan akhir magang ini.

- 6) Pimpinan dan seluruh staf di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan ini.
- 7) Semua pihak, partner magang, serta teman-teman tersayang yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan laporan akhir magang ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
- 8) Terakhir, penulis berterima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha, bertahan, berjuang, dan tetap kuat dalam menyelesaikan penyusunan laporan ini.

Yogyakarta, 14 Maret 2026



Fatma Farikah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Laporan Magang.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	10
2.3 Konsep Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	11
2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
2.5 Laporan Realisasi Anggaran.....	13
2.6 Analisis Kinerja Keuangan Laporan Realisasi Anggaran.....	20
2.7 Kajian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Sumber dan Data Penelitian	27
3.3 Metode Pengumpulan Data	28
3.4 Teknik Analisis Data.....	28
3.5 Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Profil Tempat Magang	29
4.2 Aktivitas Magang.....	32
4.3 Hasil dan Pembahasan	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53

5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Standar Pengukuran Kriteria Rasio Efisiensi	21
Tabel 2. 2 Kriteria Rasio Keserasian Belanja Daerah	22
Tabel 2. 3 Kriteria Pertumbuhan Belanja.....	23
Tabel 2. 4 Kriteria Analisis Varians (Selisih) Belanja	24
Tabel 2. 5 Kajian Terdahulu.....	25
Tabel 4. 1 Pelaksanaan Kegiatan	36
Tabel 4. 2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja 2022.....	40
Tabel 4. 3 Laporan Realisasi Anggaran Belanja 2023	41
Tabel 4. 4 Laporan Realisasi Anggaran Belanja 2024	41
Tabel 4. 5 Analisis Rasio Efisiensi Belanja	42
Tabel 4. 6 Analisis Rasio Keserasian/Aktivitas.....	45
Tabel 4. 7 Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja.....	48
Tabel 4. 8 Analisis Rasio Varians (Selisih) Belanja	51

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mengukur kinerja keuangan Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tahun 2022–2024. Permasalahan penelitian berkaitan dengan efisiensi, keserasian belanja, pertumbuhan belanja, dan varians antara anggaran dan realisasi belanja dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa LRA tahun 2022-2024 yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang telah diaudit oleh BPK. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis rasio keuangan yang meliputi rasio efisiensi belanja, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan belanja, dan rasio varians belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY secara umum berada dalam kondisi baik. Rasio efisiensi menunjukkan kondisi yang fluktuatif, sedangkan analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa alokasi anggaran masih didominasi oleh belanja operasi. Pada rasio pertumbuhan belanja menunjukkan tren penurunan, sementara varians belanja menunjukkan kondisi favourable setiap tahun. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan peningkatan efisiensi serta keseimbangan alokasi belanja agar kinerja keuangan lebih optimal.

Kata kunci: kinerja keuangan, laporan realisasi anggaran, pemerintah daerah, efisiensi belanja, varians belanja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut adanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan bagaimana anggaran disusun, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam konteks tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menjadi instrumen penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan serta sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan. Kinerja keuangan pemerintah merupakan suatu capaian pengelolaan keuangan daerah selama satu periode akuntansi dalam satu tahun. Capaian tersebut tercermin dari realisasi belanja daerah serta penerimaan daerah, seperti pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan, yang pada akhirnya akan menentukan apakah kinerja keuangan pemerintah mengalami peningkatan atau justru penurunan (Prayuda & Arifin, 2024).

Pada saat ini, sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak lagi menganut pola sentralisasi, melainkan telah bertransformasi menuju sistem desentralisasi. Transformasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan penggunaan efisiensi pelayanan publik, sekaligus memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur wilayahnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dalam implementasi otonomi tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kapasitas pembiayaan yang memadai guna mendukung pelaksanaan fungsi dan urusan pemerintahan daerah, sehingga tercapai kemandirian fiskal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan untuk membiayai kebutuhan belanja daerahnya.

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Anggaran yang telah dikelola oleh pemerintah daerah selanjutnya disusun dan disajikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban secara periodik

(Amanda et al., 2021). Sejalan dengan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan dan penyusunan anggaran, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dalam konteks tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai dasar utama dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, legislatif, maupun masyarakat luas.

Kinerja instansi pemerintahan saat ini menjadi sorotan masyarakat seiring dengan berbagai fenomena yang menunjukkan masih terjadinya pemborosan, bahkan kerugian dalam pengelolaan keuangan publik yang kurang transparan. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengukuran kinerja yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Pengukuran kinerja memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk menilai tingkat akuntabilitas pada pengelolaan keuangan pemerintah (Suhaedi, 2019). Akuntabilitas tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan dan realisasi anggaran, tetapi juga dari ketepatan sasaran penggunaan dana serta kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis guna mendukung pencapaian tujuan penganggaran.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan secara transparan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara umum pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Mangar et al., 2022). Laporan keuangan ini disusun dan dipertanggungjawabkan oleh daerah tiap tahun sesuai dengan periode tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan

bahwa LKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang tersusun serta tersaji sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Republik Indonesia, 2006). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dapat diartikan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adanya SAP sangat membantu setiap instansi pemerintah daerah dalam mengelola serta mengetahui posisi keuangan dari setiap daerah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP dapat mewujudkan *good governance* (Republik Indonesia, 2010).

Salah satu instrumen penting dalam pelaporan keuangan daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam satu periode anggaran. Menurut Amanda et al. (2021), menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan suatu keuangan entitas yang memberikan informasi mengenai anggaran penerimaan berupa pendapatan dan pengeluaran berupa belanja yang ditetapkan lalu dibandingkan dengan realisasinya. Laporan ini menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, serta pembiayaan dalam satu periode anggaran tertentu. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya (Dien et al., 2015).

Melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA), masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta bagaimana efisiensi penggunaan anggaran publik. Upaya untuk meningkatkan perekonomian suatu wilayah, salah satu indikator utama yang harus dicapai adalah kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak hanya berperan sebagai sarana pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana publik, tetapi juga digunakan sebagai instrumen analitis dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Analisis LRA memiliki peranan penting dalam menilai tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah termasuk pada pengukuran kinerja, serta dalam mengidentifikasi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan

kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang optimal dapat dicapai apabila pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga pengawasan terhadap penggunaan dana publik dapat berjalan secara efektif (Sabono & Sahusilawane, 2024).

Dalam praktiknya, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui analisis terhadap LRA menggunakan berbagai indikator rasio perhitungan keuangan yaitu rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan, serta rasio varians belanja. Analisis tersebut memberikan gambaran objektif mengenai instansi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, analisis LRA menjadi instrumen evaluasi yang penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan anggaran dan kualitas kinerja keuangan sektor publik.

Fenomena yang diambil dalam penelitian ini mengenai Analisis Laporan Realisasi Anggaran terhadap Penilaian Kinerja Keuangan Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Setda DIY) yang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi di bidang perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam menjalankan fungsi tersebut, biro ini mengelola anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi faktor utama agar program dan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Fenomena terbaru menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang akurat dan tepat waktu dapat menjadi indikator utama efektivitas pengelolaan fiskal daerah dan memberikan gambaran integritas pengelolaan keuangan publik. Selain itu, Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY juga memegang peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian daerah, perlu melakukan analisis mendalam terhadap laporan realisasi anggaran sebagai upaya untuk mengukur dan meningkatkan kinerja keuangannya.

Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY sebagai salah satu unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya daerah dan aspek perekonomian perlu melakukan evaluasi kinerja keuangannya untuk mendukung

pengambilan keputusan yang tepat dan memperbaiki pengelolaan anggaran selanjutnya. Namun demikian, dalam pelaksanaan anggaran sering dijumpai berbagai permasalahan, seperti rendahnya tingkat penyerapan anggaran, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta komposisi belanja yang kurang proporsional. Permasalahan tersebut dapat berdampak pada rendahnya kinerja keuangan dan mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan analisis evaluasi yang komprehensif terhadap Laporan Realisasi Anggaran untuk menilai kinerja keuangan secara objektif dan berbasis sesuai data dari tahun 2022-2024.

Penulis melakukan analisis selama pelaksanaan kegiatan magang di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2025 sampai dengan 31 Januari 2026 sehingga terdapat pandangan penting untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Pengukuran Kinerja Keuangan di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun Anggaran 2022-2024". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kinerja keuangan biro tersebut serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi peningkatan kualitas pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga, dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi, keserasian penggunaan anggaran, tingkat pertumbuhan dan varians belanja serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah ditinjau dari hasil analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA)?
2. Bagaimana tingkat efisiensi belanja pada Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran?
3. Bagaimana tingkat keserasian belanja pada Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY?
4. Bagaimana pertumbuhan belanja Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY dari tahun ke tahun?

5. Bagaimana varians belanja pemerintah daerah berdasarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja?

1.3 Tujuan Laporan Magang

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menilai kinerja keuangan Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY berdasarkan analisis Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022–2024.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja.
2. Menganalisis keserasian belanja antara belanja operasi dan belanja modal.
3. Menganalisis pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun.
4. Untuk menganalisis varians belanja pemerintah daerah melalui perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja.

1.3.3 Sistematika Laporan

Sistematika penulisan laporan magang ini disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai isi dari setiap bab dalam laporan. Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang pelaksanaan magang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, serta sistematika penulisan laporan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai alasan dilaksanakannya kegiatan magang serta permasalahan yang akan dibahas dalam laporan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai kerangka teoritis yang dijadikan sebagai landasan penelitian untuk mengevaluasi kinerja keuangan terhadap Laporan Realisasi Anggaran pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dan telaah kajian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan mencakup jenis penelitian, sumber dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisis terhadap data yang diperoleh selama pelaksanaan magang. Pembahasan dalam bab ini meliputi analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022–2024 dengan menggunakan beberapa indikator analisis kinerja keuangan, yaitu rasio efisiensi belanja, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan belanja, dan rasio varians belanja.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi maupun bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

1) Bagi Instansi

Bagi Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran. Hasil analisis Laporan Realisasi Anggaran periode 2022–2024 dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran di masa mendatang serta sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan keuangan yang lebih optimal dan akuntabel.

2) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada Universitas Islam Indonesia, serta dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi mahasiswa dan sivitas akademika dalam melaksanakan penelitian yang sejenis. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi karya

ilmiah di perpustakaan universitas serta mendukung pengembangan kajian yang berbasis pada data keuangan pemerintah daerah.

3) Manfaat Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan analisis Laporan Realisasi Anggaran dalam mengukur kinerja keuangan instansi pemerintah. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik penelitian, serta melatih kemampuan analisis data dan penulisan karya ilmiah sebagai bekal dalam dunia akademik maupun profesional.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Pengertian Akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik (Dona & Lestari, 2020). Akuntansi sektor publik merupakan bagian dari akuntansi yang berfokus pada proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas publik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan utama akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada masyarakat (Halim & Kusufi, 2018). Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menyediakan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi publik, seperti LRA salah satu yang dipakai sebagai dasar dalam perhitungan rasio keuangan yang menggambarkan efisiensi, dan keserasian penggunaan anggaran. Rasio-rasio tersebut merupakan indikator yang sering digunakan dalam penelitian akuntansi sektor publik untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Organisasi sektor publik saat ini menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk meningkatkan efisiensi, seiring dengan tingginya biaya ekonomi dan sosial serta berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitasnya. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya akuntansi sebagai disiplin ilmu yang penting dalam pengelolaan urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya berkembang sebagai praktik yang terbatas pada lingkup industri tertentu, namun seiring waktu akuntansi sektor publik telah berkembang menjadi bidang ilmu yang semakin penting dan memiliki peran strategis dalam pengelolaan organisasi publik (Mardiasmo, 2018).

Pada pemerintahan daerah, akuntansi sektor publik berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyediaan informasi keuangan yang dihasilkan digunakan untuk menilai kinerja keuangan, mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal yang telah

ditetapkan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya . Jika dilihat secara mendalam, akuntansi sektor publik sangat krusial dan menjadi topik yang menjadi perhatian para akademisi dan praktisi sektor publik.

2. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik khusus menyebutkan karakteristik akuntansi sektor publik sebagai berikut :

1. Pemerintah tidak berorientasi laba.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca.

2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk seluruh kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. APBD berperan sebagai instrumen kebijakan pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung peningkatan pelayanan umum serta mengurangi kesenjangan sosial di daerah. Selain itu, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian aktivitas fiskal pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab (Halim & Kusufi, 2018). Pengelolaan keuangan daerah yang baik

akan tercermin dalam laporan keuangan yang berkualitas, khususnya Laporan Realisasi Anggaran, yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan anggaran yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mencerminkan adanya keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran daerah.

2.3 Konsep Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan agar mencapai hasil yang efektif, efisien, dan akuntabel. Evaluasi kinerja keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan dalam kerangka *good governance*. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu cara yang umum digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan adalah melalui rasio-rasio keuangan yang diambil dari data LRA. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan atau program yang direncanakan maupun telah dilaksanakan dalam kaitannya dengan pemanfaatan anggaran daerah, yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dinilai melalui efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Susanto (2019) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Menurut (Mahmudi, 2019) tingkat efisiensi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan membandingkan antara input dan output yang digunakan. Semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah mencerminkan hasil pengelolaan keuangan daerah selama satu periode akuntansi berjalan. Capaian tersebut tercermin dari realisasi belanja daerah serta penerimaan daerah, seperti pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat. Selain itu, kebijakan yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan, yang pada akhirnya turut menentukan baik atau buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban keuangan oleh publik atas pelaksanaan anggaran dalam satu periode tertentu. LKPD menjadi media utama bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana publik kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masyarakat, serta lembaga pengawas lainnya, yang bertujuan untuk menilai transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. LKPD pada dasarnya mencerminkan semua transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode anggaran dan memberikan gambaran yang jelas mengenai realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, dan kewajiban pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Keuangan mendefinisikan laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan APBN yang disusun melalui laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan LKPD didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menekankan penyajian laporan dengan basis akrual. SAP menetapkan prinsip-prinsip akuntansi yang harus dipenuhi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pemerintah, sehingga laporan yang dihasilkan bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah daerah sehingga informasi dalam laporan keuangan dapat menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Karakteristik kualitatif ini sangat penting karena berbagai layanan publik bergantung pada kualitas informasi yang disajikan dalam LKPD, baik untuk perencanaan strategis maupun pengendalian keuangan.

1. Tujuan LKPD

Secara umum, LKPD bertujuan menyediakan informasi keuangan pemerintah daerah untuk:

1. menilai akuntabilitas penggunaan sumber daya publik,
2. membantu pengambilan keputusan alokasi sumber daya, dan
3. menilai kinerja keuangan serta kepatuhan pada peraturan/standar.

Studi empiris di Indonesia juga menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi, serta berimplikasi pada kepercayaan publik dan tata kelola.

2. Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat bermanfaat bagi para pengguna, laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik tersebut meliputi:

1. Relevan, yaitu informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
2. Andal, yaitu informasi yang disajikan bebas dari kesalahan material dan dapat dipercaya.
3. Dapat dibandingkan, yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan instansi lainnya.
4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan yang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai akuntansi dan kegiatan pemerintahan.

Dengan terpenuhinya karakteristik tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

2.5 Laporan Realisasi Anggaran

1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah suatu komponen laporan keuangan pemerintah yang di dalamnya menyajikan suatu informasi tentang realisasi dan anggaran pada entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Menurut definisi standar, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode tertentu (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). LRA terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Menurut Rukayah et al., (2017) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinyadalam satu periode pelaporan periode tertentu. Menurut Halim (2016), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anggaran tidak dapat direalisasikan secara optimal, di antaranya lemahnya proses perencanaan anggaran. Selain itu, rendahnya tingkat realisasi anggaran mencerminkan kurang optimalnya pelaksanaan program pemerintah, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangan pemerintah.

Pada dasarnya, penerapan prinsip anggaran berimbang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya defisit anggaran yang timbul akibat perencanaan belanja melebihi kapasitas pendapatan daerah. Apabila realisasi pendapatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran, maka kekurangan tersebut dapat ditutupi melalui mekanisme pinjaman daerah. Pinjaman ini harus dilakukan secara terencana, hati-hati, serta disesuaikan dengan kemampuan riil keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah. Sebaliknya, apabila terjadi kelebihan realisasi pendapatan dari target yang telah ditetapkan, maka kelebihan tersebut tidak serta-merta harus dibelanjakan. Dana tersebut dapat dialokasikan dalam perubahan anggaran dan ditempatkan pada pos dana cadangan atau belanja.

2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran memiliki beberapa tujuan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara umum, tujuan penyusunan LRA adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, serta pembiayaan yang dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
2. Menjadi alat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dalam satu periode tertentu.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta penyusunan anggaran pada periode berikutnya.

3. Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam Laporan Realisasi Anggaran terdapat beberapa unsur utama yang digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan anggaran selama satu periode tertentu. Berikut ini Unsur – unsur yang ada dalam LRA adalah :

- 1) Belanja
- 2) Pendapatan LRA
- 3) Transfer daerah
- 4) Pembiayaan

1) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan hal-hal yang telah berkaitan, belanja dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran yang telah dianggarkan untuk mendukung kegiatan rutin pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan manfaat yang bersifat jangka pendek. Belanja ini digunakan untuk menjamin

kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Belanja operasi terdiri atas beberapa jenis, antara lain:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk memberikan kompensasi atau imbalan kepada aparatur pemerintah. Kompensasi tersebut dapat berbentuk uang maupun barang yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pegawai non-PNS yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran ini merupakan balas jasa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan aset tetap atau belanja modal. Contoh belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan, honorarium, uang lembur, iuran jaminan sosial, serta pengeluaran lain yang berkaitan langsung dengan pegawai.

2. Belanja Barang

Belanja barang merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang habis pakai serta jasa yang diperlukan dalam mendukung operasional pemerintahan. Belanja ini mencakup pembelian barang yang digunakan dalam proses penyediaan layanan kepada masyarakat, baik yang diperdagangkan maupun yang tidak untuk dijual, termasuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat serta belanja perjalanan dinas. Dapat dibedakan menjadi 3 jenis seperti berikut ini :

1) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional perkantoran sehari-hari. Pengeluaran ini meliputi pengadaan barang habis pakai, seperti alat tulis kantor (ATK), penggantian inventaris kantor, pembayaran langganan daya dan jasa, serta berbagai pengeluaran lain yang mendukung pelaksanaan pekerjaan nonfisik yang secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, belanja ini juga mencakup pengadaan inventaris kantor dengan nilai yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap

sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pembiayaan kegiatan pelatihan dan penelitian.

2) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi aset yang telah dimiliki pemerintah daerah agar tetap berada dalam keadaan layak pakai. Kegiatan pemeliharaan ini mencakup perawatan dan perbaikan atas aset tetap maupun aset lainnya guna mengembalikan atau mempertahankan kondisi normal tanpa memperhitungkan besarnya volume pengeluaran. Jenis belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan tanah, gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, serta perbaikan sarana dan prasarana seperti peralatan, mesin, jalan, jaringan irigasi, dan berbagai fasilitas lain yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

3) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan perjalanan dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab jabatan aparatur pemerintah.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga adalah pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk membayar beban bunga atas kewajiban utang. Pembayaran tersebut timbul dari pokok pinjaman yang masih terutang (*principal outstanding*), baik yang berasal dari pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang bergerak dalam kegiatan produksi, distribusi, ekspor, atau impor barang dan jasa yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pemberian subsidi bertujuan agar harga jual barang atau jasa tersebut tetap terjangkau oleh masyarakat. Dalam praktiknya, belanja subsidi dapat disalurkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan swasta. Dengan demikian, belanja subsidi dapat dipahami sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan kepada lembaga atau badan usaha tertentu untuk menekan biaya produksi sehingga harga produk atau jasa yang dihasilkan dapat diakses oleh masyarakat.

5. Hibah

Hibah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan. Pemberian hibah telah ditentukan peruntukannya secara spesifik, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak diberikan secara berulang atau terus-menerus.

6. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah transfer berupa uang atau barang yang disalurkan kepada masyarakat guna melindungi dari potensi risiko sosial. Bantuan ini dapat diberikan secara langsung kepada individu maupun kepada lembaga kemasyarakatan, termasuk lembaga nonpemerintah yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan. Dengan demikian, belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sifat selektif dan tidak berkelanjutan.

B. Belanja Modal

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, belanja modal memiliki peranan penting karena mencerminkan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap. Pada umumnya, aset tetap merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam neraca pemerintah daerah. Belanja modal dapat diartikan sebagai pengeluaran anggaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap maupun aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak rutin dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja ini digunakan untuk kebutuhan mendesak yang tidak dianggarkan secara khusus dalam pos belanja lainnya. Contoh penggunaan belanja tidak terduga antara lain dalam rangka penanggulangan bencana alam maupun bencana sosial yang kejadiannya tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Selain itu, belanja ini juga dapat digunakan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya yang telah ditutup.

2) Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan kas yang menambah ekuitas dana pemerintah daerah dalam satu periode tahun anggaran, yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak menimbulkan kewajiban untuk dikembalikan. Pendapatan daerah dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah seluruh penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah itu sendiri, yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah guna mendanai kebutuhan pelaksanaan desentralisasi dan mendukung kemampuan keuangan daerah.

c) Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah penerimaan daerah di luar PAD dan dana perimbangan, yang diperoleh antara lain dari bantuan keuangan serta dana penyesuaian atau transfer lainnya dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Transfer

Transfer adalah pengeluaran atau penerimaan kas antar entitas pemerintahan yang tidak perlu dikembalikan. Transfer dapat berupa transfer bagi hasil pendapatan maupun transfer bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lain atau desa. Dalam LRA SKPD tertentu, unsur transfer dapat tidak muncul apabila SKPD tersebut tidak melaksanakan fungsi penyaluran transfer.

4) Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2.6 Analisis Kinerja Keuangan Laporan Realisasi Anggaran

Dalam penelitian ini, analisis kinerja keuangan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) difokuskan hanya pada komponen belanja. Hal ini disebabkan karena pada objek penelitian tidak terdapat unsur pendapatan yang dikelola atau dilaporkan dalam struktur anggarannya. Dengan demikian, komponen pendapatan tidak dapat dianalisis dalam pengukuran kinerja keuangan sektor publik yang umumnya mencakup perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja. Meskipun tidak mencakup pendapatan, analisis terhadap belanja tetap relevan dan memadai untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan. Komponen belanja mencerminkan bagaimana sumber daya yang telah dialokasikan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan melalui perbandingan antara anggaran belanja dan realisasi belanja guna menilai tingkat serapan anggaran, efisiensi penggunaan dana, serta kepatuhan terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

1. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan salah satu indikator perhitungan rasio dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan anggaran secara hemat dan optimal dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah direncanakan. Efisiensi belanja menunjukkan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Mahmudi (2015) efisiensi berkaitan dengan hubungan antara input dan output, di mana suatu kegiatan dikatakan efisien apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin.

Dalam keuangan daerah, efisiensi belanja mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Menurut Amanda et al. (2021) Rasio efisiensi memuat informasi terkait jumlah dana yang dikeluarkan untuk pengeluaran dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diterima. Jika rasio yang dihasilkan kurang dari 100%, maka dapat dikatakan kinerja pemerintah daerah tersebut efisien. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Analisis efisiensi digunakan untuk menghitung efisiensi pengelolaan anggaran yang dilakukan dengan membandingkan anggaran belanja dengan

realisasinya. Perhitungan efisiensi melibatkan Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran apabila rasio efisiensi belanja kurang dari 100 persen, sedangkan rasio di atas 100 persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2015). Data yang digunakan untuk perhitungan ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY untuk periode tahun 2022-2024, dan dihitung menggunakan rumus berikut ini Halim (2016):

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Operasi}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, Kriteria tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Standar Pengukuran Kriteria Rasio Efisiensi

Kriteria	Keterangan
> 100%	Tidak Efisien
90% – 100%	Kurang Efisien
80% – 90%	Cukup Efisien
60% – 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kep. Mendagri (1996)

2. Analisis Rasio Kecerasan/Aktivitas

Rasio keserasian atau rasio aktivitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi anggaran antara belanja operasi (rutin) dan belanja pembangunan secara proporsional. Rasio ini mencerminkan komposisi penggunaan anggaran daerah dalam mendukung kegiatan operasional pemerintahan maupun kegiatan yang bersifat pembangunan. Dalam rasio keserasian terdapat dua jenis perhitungan utama, yaitu:

a. Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini memberikan informasi mengenai besarnya porsi anggaran daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan.

Secara umum, belanja operasi cenderung mendominasi total belanja daerah, dengan proporsi berkisar antara 60% sampai 90% (Mahmudi, 2019).

Rasio belanja operasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20% (Mahmudi, 2019). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2 Kriteria Rasio Kesorasian Belanja Daerah

Proporsi	Persentase (%)
Belanja Operasi	60-90
Belanja Modal	5-20

Sumber: Mahmudi (2019)

3. Analisis Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2019). Menurut Halim (2016), rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mempertahankan atau meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Dalam konteks belanja daerah, rasio pertumbuhan belanja menggambarkan yang dimana tren kebijakan fiskal pemerintah daerah, apakah cenderung mengalami peningkatan, penurunan, atau stagnasi dari tahun ke tahun.

Analisis pertumbuhan belanja digunakan untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun, baik mengalami peningkatan maupun penurunan (Patih et al., 2022). Tingkat pertumbuhan belanja dihitung dengan membandingkan selisih realisasi

belanja pada tahun berjalan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan realisasi belanja tahun sebelumnya sebagaimana dikemukakan oleh (Mahmudi, 2019). Analisis pertumbuhan belanja penting dilakukan untuk menilai perkembangan kinerja pengelolaan belanja pemerintah daerah. Pada umumnya, anggaran belanja memiliki kecenderungan untuk meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut biasanya disebabkan oleh penyesuaian terhadap perubahan cakupan layanan entitas, kondisi makroekonomi, tingkat inflasi, serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Selain itu, analisis pertumbuhan belanja bertujuan untuk mengukur besarnya pertumbuhan pada masing-masing jenis belanja serta menilai apakah pertumbuhan belanja tersebut bersifat rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Belanja Tahun Berjalan} - \text{Belanja Tahun Lalu}}{\text{Belanja Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Dalam menilai kinerja pertumbuhan realisasi anggaran belanja pemerintah daerah terdapat kriteria dan ukuran pertumbuhan belanja yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Kriteria Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran Pertumbuhan Belanja
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber: Mahmudi (2019)

4. Analisis Rasio Varians (Selisih) Belanja

Analisis varians belanja merupakan perhitungan selisih antara realisasi belanja dan anggaran belanja dalam satu periode tertentu (Mahmudi, 2019). Perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran, baik dari sisi nominal maupun persentase. Meskipun metode analisis varians belanja tergolong sederhana, analisis ini mampu memberikan informasi yang penting terkait pengelolaan anggaran. Dalam analisis ini, kinerja pengelolaan anggaran dinilai baik apabila realisasi belanja tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan.

Menurut Halim & Kusufi (2018) varians belanja menunjukkan selisih antara anggaran dan realisasi belanja, yang dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran yang realistis dan melaksanakan anggaran secara terkendali. Varians belanja menjadi alat evaluasi penting karena dapat mengidentifikasi adanya pemborosan anggaran atau sebaliknya menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana publik.

Varians belanja dapat bernilai positif (*favorable*) maupun negatif (*unfavorable*). Varians positif terjadi apabila realisasi belanja lebih kecil daripada anggaran belanja, yang menunjukkan adanya penghematan anggaran. Sebaliknya, varians negatif terjadi apabila realisasi belanja melebihi anggaran yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan terjadinya pemborosan atau lemahnya pengendalian anggaran. Adapun rumus yang digunakan dalam analisis varians belanja adalah:

$$\text{Varians (Selisih) Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Menurut Suhaedi (2019), varians belanja yang kecil menunjukkan kualitas perencanaan anggaran yang baik dan pelaksanaan anggaran yang terkendali. Sebaliknya, varians belanja yang besar mencerminkan lemahnya pengendalian anggaran serta ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran. Analisis varians belanja bertujuan untuk mengetahui tingkat penyerapan anggaran serta mengukur besarnya penghematan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun kriteria pengukuran analisis varians (selisih) belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kriteria Analisis Varians (Selisih) Belanja

Kriteria Varians (Selisih) Belanja	Kategori Varians (Selisih) Belanja	Ukuran
Baik	Selisih Disukai (<i>favourable variance</i>)	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik	Selisih Tidak Disukai (<i>unfavourable variance</i>)	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Sumber: Mahmudi (2019)

2.7 Kajian Terdahulu

Tabel 2. 5 Kajian Terdahulu

No.	Penulis	Objek	Temuan
1.	Rahmah et al. (2023)	Kantor Camat Liukang Kalmas, Kab. Pangkep	Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas anggaran relatif stabil dari tahun ke tahun, namun tingkat efisiensi mengalami fluktuasi. Hal ini menandakan bahwa pengendalian belanja belum konsisten dan masih dipengaruhi oleh lemahnya perencanaan anggaran.
2.	Ni Kadek Putri Taruni & I Putu Gede Diatmika (2025)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Badung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Badung tahun 2020–2024 tergolong cukup efektif dengan rata-rata sebesar 86,53%. Namun tingkat efisiensi tergolong kurang efisien dengan rata-rata 68,27%. Pertumbuhan belanja tergolong rendah karena rata-rata bernilai negatif sebesar -5,06%. Selain itu, keserasian belanja menunjukkan bahwa belanja operasi masih mendominasi dibandingkan belanja modal sehingga pengelolaan belanja daerah belum optimal.
3.	Nur Widiyaningsih (2021)	Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro	Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro tahun anggaran 2017–2020 secara umum berada pada kategori efisien dan efektif. Penggunaan anggaran telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

No.	Penulis	Objek	Temuan
4.	Novridha Dwitia Permata (2022)	Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta	Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi dan UKM DIY tahun anggaran 2019–2021 secara umum sudah baik. Hasil analisis varians (selisih) belanja menunjukkan adanya penghematan anggaran (<i>favourable variance</i>). Pertumbuhan belanja selama periode penelitian tergolong positif dan wajar, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019. Analisis efisiensi belanja menunjukkan kategori kurang efisien, sedangkan analisis efektivitas belanja menunjukkan kinerja efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 93,54%.
5.	Nurfadilah Jalaluddin (2023)	Pemerintah Daerah Kabupaten Majene	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah belum efektif karena realisasi pendapatan belum mencapai target. Namun, dari sisi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Majene dinilai cukup efisien karena mampu melakukan penghematan anggaran.
6.	Suhaedi (2019)	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja belanja daerah Kabupaten Lombok Barat periode 2014–2018 memiliki varians belanja rata-rata sebesar 93,30% yang termasuk kategori <i>favourable variance</i> . Sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi dengan rata-rata 79,48%, sedangkan belanja modal sebesar 20,02%. Selain itu, rasio efisiensi belanja rata-rata sebesar 93,30% menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran masih tergolong kurang efisien.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diteliti melalui pengumpulan data numerik, yang selanjutnya diolah dan dianalisis guna menghasilkan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, data keuangan yang dianalisis berkaitan dengan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024. Subjek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan objek penelitiannya berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY periode 2022–2024. Data tersebut diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi DIY yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3.2 Sumber dan Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian, melainkan melalui dokumen atau pihak lain yang telah mengumpulkannya terlebih dahulu. Data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Setda DIY), yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi DIY yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Data tersebut difokuskan pada perhitungan berbagai rasio keuangan dalam LRA tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024 sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan. Perolehan data dilakukan melalui Bagian Pusat Pengelola Data dan Informasi Keuangan pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY. Selain itu, data pendukung juga diperoleh melalui studi kepustakaan serta berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini juga dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, serta gambar berupa laporan dan keterangan yang dapat mendukung penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mempelajari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

1. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Operasi}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Analisis Rasio Keserasian/Aktivitas

a. Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3. Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Belanja Tahun Berjalan} - \text{Belanja Tahun Lalu}}{\text{Belanja Tahun Lalu}} \times 100\%$$

4. Analisis Rasio Varians (Selisih) Belanja

$$\text{Varians (Selisih) Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Tempat Magang



Gambar 4.1 Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY

Nama Instansi :Biro Perekonomian dan Setda DIY

Alamat : Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, Kode Pos 55213

Telepon : (0274) 562811

Surat Elektronik: biro.perekonomian@jogjaprov.go.id

Website : biroperekonomian.jogjaprov.go.id

Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Biro PSDA) Setda DIY merupakan instansi di bawah Sekretariat Daerah DIY yang berperan sebagai pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam di DIY. Biro PSDA Setda DIY dibentuk untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Biro PSDA Setda DIY juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Biro PSDA Setda DIY memiliki tujuan untuk melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam; melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta melaksanakan fungsi pengawasan internal dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam.

- Struktur Organisasi

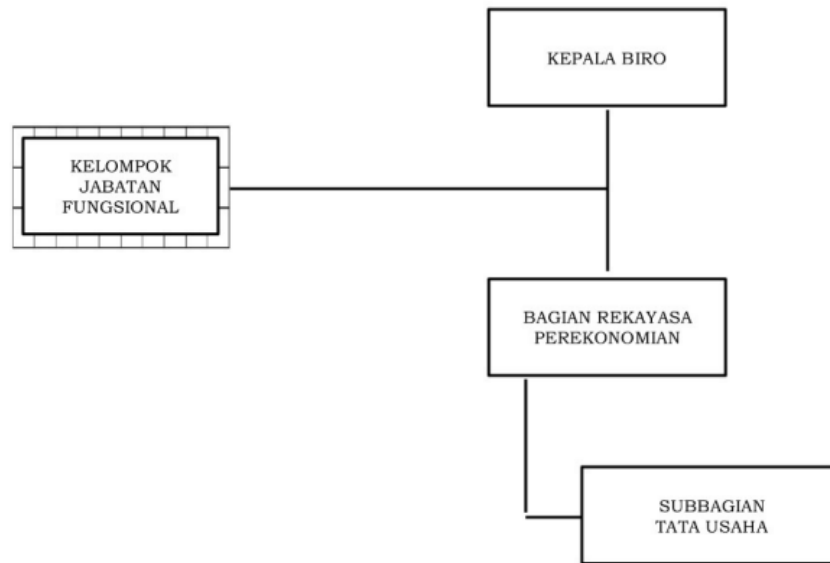
Pada saat pembentukan Biro PSDA Setda DIY memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Kepala Biro, tiga bagian, dan enam sub bagian. Adapun susunan organisasi Biro PSDA Setda DIY adalah sebagai berikut:

1. Bagian Pengelolaan Stabilitas Perekonomian Daerah terdiri atas:
 1. Subbagian Pengendalian Inflasi Daerah
 2. Subbagian Analisis Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah
2. Bagian Rekayasa Perekonomian terdiri atas:
 1. Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah
 2. Subbagian Tata Usaha
3. Bagian Pengelolaan Sumber Daya Perekonomian terdiri atas:
 1. Subbagian Analisis Kebijakan Ekonomi Hijau
 2. Subbagian Analisis Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam

Struktur organisasi terbaru Biro PSDA menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah terdiri atas:

1. Kepala Biro
2. Bagian Rekayasa Perekonomian, terdiri atas Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut ini bagan lengkap struktur organisasi Biro Perekonomian dan Setda DIY



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY

- Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja Biro;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
3. pengoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, perekonomian, serta rekayasa sumber daya perekonomian;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, perekonomian, serta rekayasa sumber daya perekonomian;
5. penyusunan evaluasi capaian program Pemerintah Daerah;

6. pembinaan reformasi birokrasi Biro;
7. penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
8. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
10. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

4.2 Aktivitas Magang

Pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 01 Oktober 2025 sampai pada tanggal 31 Januari 2026. Sebelum penulis melaksanakan magang penulis melakukan persiapan seperti mempelajari profil perusahaan serta melakukan riset terkait dengan data laporan keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dilakukan penyusunan oleh Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY. Pada tanggal 01 Oktober 2025 penulis diberi pengarahan selama magang mengenai jam kerja kantor dan tata berpakaian selama kegiatan magang dilakukan yaitu mengenakan pakaian rapi dan sopan. Sebagai rincian pada hari senin sampai rabu menggunakan atasan putih dan bawahan hitam/ gelap, sedangkan pada hari Kamis dan Jumat berpakaian batik. Kemudian untuk kegiatan magang dilaksanakan pada 5 hari kerja, yaitu dari hari senin sampai Jumat dengan jam kerja yang dimulai pukul 07.30 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB. Pengarahan awal yang dilakukan juga menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan magang, budaya kerja di organisasi terkait, dan beberapa gambaran tentang tugas yang akan dikerjakan oleh penulis pada bidang pengelola akuntansi keuangan.

Pada awal bulan pelaksanaan magang dilaksanakan yaitu bulan Oktober, pada hari pertama penulis mendapat kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada seluruh pegawai bagian yang memiliki kaitan dengan bagian pengelola akuntansi keuangan dan bagian yang lainnya. Pada bulan pertama pelaksanaan magang di bulan Oktober, penulis memulai beradaptasi dengan lingkungan kerja di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dengan mempelajari sistem administrasi dan pengelolaan dokumen yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan pada periode ini didominasi oleh aktivitas pengarsipan, digitalisasi dokumen, serta pendampingan dalam kegiatan rapat dan administrasi

keuangan. Penulis melakukan pemindaian (scanning) berbagai dokumen administratif seperti invoice, bukti pembayaran, surat permohonan, serta surat kesanggupan pemotongan pajak. Proses ini tidak hanya sebatas digitalisasi dokumen, tetapi juga memastikan kelengkapan data, keterbacaan dokumen, serta kesesuaian dengan klasifikasi arsip sebelum dikirimkan melalui surat elektronik resmi instansi. Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya ketelitian dalam menjaga validitas dan keutuhan dokumen keuangan.

Selain itu, penulis juga melakukan pemindaian dokumen kepegawaian seperti daftar nominatif surat keputusan hukuman disiplin PNS, rekap prestasi pegawai, serta laporan kehadiran harian bulan sebelumnya. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memahami bahwa pengelolaan administrasi kepegawaian memiliki keterkaitan dengan aspek pertanggungjawaban kinerja dan evaluasi pegawai sipil negara. Penulis ikut serta berpartisipasi dalam membantu pencatatan materi rapat atau *notulen* terkait kebijakan kekancingan tanah untuk usaha garam di provinsi DIY. Dalam kegiatan ini, mahasiswa mempelajari proses penyusunan notulensi yang sistematis, mencatat poin-poin penting pembahasan, serta merangkum hasil diskusi sebagai bahan dokumentasi kebijakan.

Pada pertengahan bulan Oktober, penulis terlibat dalam pelaksanaan rapat penyiapan bahan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Mandiri Budaya serta audiensi bersama pihak eksternal dalam rangka penyelenggaraan acara olahraga YCK10K 2026. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman mengenai mekanisme koordinasi sesama pihak eksternal dan pentingnya dokumentasi administratif dalam setiap kegiatan resmi pemerintah. Penulis juga melakukan konversi dokumen arsip keuangan pada Microsoft Excel sebagai bagian dari proses digitalisasi dan efisiensi pengarsipan. Kegiatan ini membutuhkan ketelitian dalam memindahkan data numerik dan tekstual agar tidak terjadi kesalahan input data keuangan.

Selanjutnya, penulis membantu proses penginputan data kepegawaian menggunakan Microsoft Excel, termasuk penyesuaian format tabel, perapihan data, serta pengecekan ulang untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Selain itu, penulis melakukan pengecekan dan pemberian nomor dokumen sesuai daftar arsip yang telah tersedia sesuai tahunnya. Proses penomoran arsip ini merupakan bagian penting dalam

sistem kearsipan agar dokumen mudah ditelusuri kembali ketika dibutuhkan dan akan dikelola oleh bagian proses arsip selanjutnya di Biro Umum dan Protokol Setda DIY. Penulis juga diberikan tugas dalam proses penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Kegiatan ini meliputi pencatatan nomor Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pengelompokan dokumen pendukung seperti kuitansi dan bukti transaksi, sampai pemisahan dokumen ke dalam map sesuai klasifikasi arsip. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme pertanggungjawaban anggaran dalam sistem keuangan pemerintah daerah.

Memasuki bulan kedua pada bulan November, penulis mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai kearsipan dokumen yang dikelola oleh Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam dari informasi yang lebih kompleks dalam bidang pengarsipan dan dokumentasi administrasi. Penulis membantu penyusunan serta penginputan arsip berupa undangan rapat kegiatan, majalah harian, dokumen kepegawaian, laporan absensi, laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) triwulan, serta laporan SKP tahunan. Kegiatan ini memenuhi konsistensi kelengkapan dalam pengelompokan dokumen berdasarkan jenis, periode waktu, serta klasifikasi arsip aktif dan inaktif. Selain kegiatan administratif, penulis juga ikut membantu dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau Tahun 2025–2029. Keterlibatan dalam kegiatan ini memberikan wawasan mengenai informasi pada hubungan antara kebijakan publik, penganggaran daerah, dan pelaporan kinerja. Pada kegiatan magang di bulan ini, penulis mulai memahami bahwa pengelolaan arsip bagian keuangan merupakan bagian penting yang mendasar dari sistem akuntabilitas publik dan transparansi pemerintahan.

Pada bulan ketiga bulan Desember, kegiatan magang lebih berfokus pada rekapitulasi data dan pengelolaan dokumen keuangan. Penulis membantu penyusunan dan penginputan data arsip koperasi, Korsi Monev, surat AKP, PSPD, P3EW Kop UKM, serta PID. Kegiatan ini memperluas pemahaman sebagai mahasiswa yang mempelajari akuntansi publik pemerintahan mengenai ragam dokumen yang dikelola oleh Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam mendukung pelaksanaan program ekonomi daerah. Penulis juga melakukan rekap anggaran biaya pemakaian bahan bakar dan minyak (BBM) periode Januari–September 2025. Proses

rekapitulasi ini melibatkan pengumpulan bukti transaksi, pencocokan nominal, serta penyusunan laporan dalam format yang sistematis.

Selain itu, penulis turut berkontribusi dalam proses rekapitulasi arsip analisis kebijakan pengembangan ekonomi daerah (akped) berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2019 dan 2020, serta melakukan pendataan ulang cuti kepegawaian pada bidang PSDA. Kegiatan tersebut memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi karena berkaitan dengan pengelolaan data historis dan dokumen administratif yang bersifat jangka panjang. Pada akhir bulan, penulis membantu pengelompokan data buku arsip inaktif Biro APSDA. Proses ini dilakukan dengan melakukan klasifikasi dokumen berdasarkan tahun, jenis kegiatan, serta status aktif/inaktif sesuai pedoman aturan format kearsipan yang berlaku.

Pada bulan terakhir pelaksanaan magang bulan Januari, penulis diberikan tugas pekerjaan dalam proses pengecekan dan penginputan laporan keuangan. Penulis membantu menginput arsip analisis kebijakan pengembangan ekonomi daerah (akped) tahun 2021–2025 serta melakukan pengecekan Laporan Keuangan Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY. Proses pengecekan ini mencakup verifikasi angka, kesesuaian antara dokumen sumber dan laporan, serta memastikan tidak terdapat kesalahan pencatatan. Penulis juga melakukan penyusunan dan penginputan angka laporan keuangan tahun 2025 ke dalam format pelaporan resmi yang disusun pada Microsoft Excel. Kegiatan ini memberikan pengalaman dan praktik langsung dalam menyusun struktur laporan keuangan instansi pemerintah daerah. Pada akhir periode magang, penulis membantu merevisi dokumen Arsip Inaktif RO APSDA Januari 2026. Kegiatan revisi dilakukan untuk memastikan kesesuaian klasifikasi dan kelengkapan dokumen sebelum dilakukan penyimpanan jangka panjang.

Berikut merupakan tabel yang berisikan kegiatan penulis dalam pelaksanaan kegiatan magang di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY :

Tabel 4. 1 Pelaksanaan Kegiatan

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1.	01 Oktober 2025 - 06 Oktober 2025	- Mempelajari profil instansi Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY - Menerima pembekalan mengenai jam kerja dan penempatan bagian untuk kegiatan magang - Mempelajari sistem akuntansi yang digunakan pada Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY - Melakukan analisis dan riset terhadap laporan keuangan pada Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY
2.	07 Oktober 2025 - 09 Oktober 2025	- Mempelajari kegiatan scan dokumen - Melakukan Scan dokumen/ berkas seperti invoice, bukti pembayaran, perihal permohonan, surat kesanggupan dipotong pajak lalu kirim ke email. - Scan berkas berupa daftar nominatif surat keputusan hukuman disiplin PNS bulan september, rekap prestasi bulan september 2025, dan kehadiran harian di bulan september para pegawai di biro perekonomian dan SDA Setda DIY. - Membantu pencatatan materi rapat atau notulen tentang kekancingan tanah untuk usaha garam di provinsi DIY.
3.	13 Oktober 2025 - 16 Oktober 2025	- Ikut serta berpartisipasi pelaksanaan rapat dalam rangka penyiapan bahan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Mandiri Budaya di DIY. - Membantu pelaksanaan rapat kegiatan Audiensi bersama CV. Jorace Sport Organizer dalam rangka penyelenggaraan acara lari YCK10K 2026.
4.	20 Oktober 2025 - 23 Oktober 2025	- Melakukan convert file pada pengarsipan dokumen Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY dari bentuk file pdf ke dalam bentuk excel. - Membantu dalam menginput data kepegawaian dengan menggunakan excel. - Membantu dalam proses pengecekan dan pemberian nomor pada dokumen sesuai dengan daftar arsip yang telah tersedia. - Melanjutkan dalam proses pengecekan dan pemberian nomor pada dokumen dengan daftar arsip yang tersedia. - Membantu dalam menginput surat/berita undangan ke dalam website srikandi.

5.	27 Oktober 2025 - 30 Oktober 2025	- Diberikan tugas dalam penyusunan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) proses dari pencatatan nomor Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai memisahkan dokumen tersebut ke dalam map yang sudah di berikan nomor data yang sesuai dengan dokumen Surat Pertanggungjawaban tersebut.
6.	11 November 2025 - 27 November 2025	- Membantu dalam penyusunan dan memasukan data arsip berupa undangan rapat kegiatan, majalah harian, kepegawaian, laporan absensi, laporan skp triwulan kepegawaian, laporan skp tahunan.
7.	20 November 2025	- Membantu pelaksanaan acara rapat Rapat Koordinasi Monev Implementasi Pergub Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau Tahun 2025-2029
8.	01 Desember 2025 - 11 Desember 2025	- Membantu dalam penyusunan dan memasukan data arsip berupa koperasi, korsi monev, surat AKP, surat PSPD, surat P3EW Kop UKM, dan PID. - Membantu merekap anggaran biaya pemakaian bahan bakar dan minyak (BBM) di Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY bulan Januari-September 2025.
9.	12 Desember 2025 - 31 Desember 2025	- Membantu dalam merekap arsip akuntansi analisis kebijakan pengembangan ekonomi daerah (akped) berupa SPJ tahun 2019 dan 2020. - Membantu dalam merekap cuti kepegawaian PSDA. - Membantu dalam mengelompokan klasifikasi data buku arsip inaktif Biro APSDA.
10.	01 Januari 2026 - 12 Januari 2026	- Membantu dalam menginput arsip analisis kebijakan pengembangan ekonomi daerah (akped) tahun 2021-2025 - Melakukan pengecekan pada Laporan Keuangan Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

11.	13 Januari 2026 - 30 Januari 2026	- Melakukan penginputan angka Laporan Keuangan Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY pada tahun 2025 - Membantu melakukan revisi terhadap dokumen Arsip Inaktif RO APSDA periode Januari 2026.
-----	--------------------------------------	---

Selama pelaksanaan kegiatan magang di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis memperoleh berbagai data dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan, pengarsipan dokumen, serta pelaporan instansi pemerintah daerah. Data yang diperoleh tidak hanya berupa dokumen fisik, tetapi juga data digital yang dikelola melalui sistem administrasi dan aplikasi pengolahan data seperti Microsoft Excel serta sistem kearsipan elektronik (Srikandi).

Data-data tersebut kemudian digunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian terkait dengan laporan keuangan tahun 2022-2024 khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan akhir program magang ini adalah dengan dokumentasi dan observasi. Selain menggunakan kedua metode tersebut, penulis juga melakukan metode analisis dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian yang datanya dapat diakses dipublik. Berikut ini output yang diperoleh penulis selama kegiatan magang berlangsung di Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
2. Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
3. Arsip laporan kepegawaian (absensi, SKP triwulan dan tahunan).
4. Rekap anggaran biaya BBM.
5. Laporan keuangan Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY.
6. Arsip Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah (AKPED).
7. Dokumen arsip inaktif Biro APSDA.

4.3 Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum

Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Setda DIY) merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki peran dalam perumusan kebijakan, koordinasi, serta pembinaan di bidang perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, biro ini mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disepakati dalam perencanaan keuangan daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pengelolaan anggaran pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis terhadap realisasi anggaran untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis terhadap realisasi anggaran tersebut bertujuan untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah serta sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran pada periode berikutnya agar pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih optimal.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap Laporan Realisasi Anggaran pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun 2024. Struktur belanja pada biro tersebut terdiri atas dua kelompok utama, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi mencakup belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari. Sementara itu, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti peralatan dan mesin.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio efisiensi belanja, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan belanja, serta rasio varians belanja. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kinerja pengelolaan anggaran pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY

selama periode tahun 2022–2024. Berikut ini adalah analisis Laporan Realisasi Anggaran pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tahun 2022–2024.

2. Data Khusus

Berikut penyajian data khusus yang penulis peroleh dari Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY yang merupakan penyajian data dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022-2024 yang diuraikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4. 2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
2	3	4	$5 = \frac{(4/3) *}{100}$	6
Belanja Daerah	2.830.446.750	2.666.076.075	94,19%	7.717.215.022
Belanja Operasi	2.830.446.750	2.666.076.075	94,19%	7.632.918.022
Belanja Pegawai	42.360.000	42.360.000	100,00%	4.515.087.858
Belanja Barang Dan Jasa	2.788.086.750	2.623.716.075	94,10%	3.117.830.164
Jumlah Belanja Operasi	2.830.446.750	2.666.076.075	94,19%	7.632.918.022
Belanja Modal	-	-		84.297.000
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	-	-		82.997.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		1.300.000
Jumlah Belanja Modal	-	-		84.297.000
Jumlah Belanja	2.830.446.750	2.666.076.075	94,19%	7.717.215.022
Surplus/Defisit	(2.830.446.750)	(2.666.076.075)	94,19%	(7.717.215.022)

Sumber: BPK, LHP LKPD Tahun 2022

Tabel 4. 3 Laporan Realisasi Anggaran Belanja 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
2	3	4	$5 = \frac{(4/3)}{100} *$	6
Belanja Daerah	2.190.276.100	2.174.775.188	99,29%	2.666.076.075
Belanja Operasi	1.690.076.600	1.676.755.888	99,21%	2.666.076.075
Belanja Pegawai	42.360.000	42.360.000	100,00%	42.360.000
Belanja Barang Dan Jasa	1.647.716.600	1.634.395.888	99,19%	2.623.716.075
Jumlah Belanja Operasi	1.690.076.600	1.676.755.888	99,21%	2.666.076.075
Belanja Modal	500.199.500	498.019.300	99,56%	-
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	500.199.500	498.019.300	99,56%	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	500.199.500	498.019.300	99,56%	-
Jumlah Belanja	2.190.276.100	2.174.775.188	99,29%	2.666.076.075
Surplus/Defisit	(2.190.276.100)	(2.174.775.188)	99,29%	(2.666.076.075)

Sumber: BPK, LHP LKPD Tahun 2023

Tabel 4. 4 Laporan Realisasi Anggaran Belanja 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
2	3	4	$5 = \frac{(4/3)}{100} *$	6
Belanja Daerah	1.522.625.700	1.479.747.760	97,18%	2.174.775.188
Belanja Operasi	1.457.725.700	1.420.663.760	97,46%	1.676.755.888
Belanja Pegawai	38.400.000	38.400.000	100,00%	42.360.000
Belanja Barang Dan Jasa	1.419.325.700	1.382.263.760	97,39%	1.634.395.888
Jumlah Belanja Operasi	1.457.725.700	1.420.663.760	97,46%	1.676.755.888
Belanja Modal	64.900.000	59.084.000	91,04%	498.019.300
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	64.900.000	59.084.000	91,04%	498.019.300
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	64.900.000	59.084.000	91,04%	498.019.300
Jumlah Belanja	1.522.625.700	1.479.747.760	97,18%	2.174.775.188
Surplus/Defisit	(1.522.625.700)	(1.479.747.760)	97,18%	(2.174.775.188)

Sumber: BPK, LHP LKPD Tahun 2024

3. Pembahasan

Analisis kinerja keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tahun anggaran 2022 s.d. 2024 perhitungannya sebagai berikut:

1) Analisis Rasio Efisien Belanja

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran yang telah ditetapkan untuk membiayai kegiatan operasional. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara realisasi belanja operasi dengan anggaran belanja daerah yang telah direncanakan. Dengan demikian, rasio ini menggambarkan seberapa besar anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan anggaran yang telah dialokasikan.

Berikut ini perhitungan analisis rasio efisiensi belanja pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dari tahun 2022 sampai tahun 2024 :

Tabel 4. 5 Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja Operasi	Rasio Efisiensi	Keterangan
2022	2.830.446.750	2.666.076.075	94,19%	Kurang Efisien
2023	2.190.276.100	1.676.755.888	76,55%	Efisien
2024	1.522.625.700	1.420.663.760	93,30%	Kurang Efisien

Sumber: LHP LK Biro PSDA Audited BPK, yang diolah

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio efisiensi selama periode tahun 2022-2024 berada di bawah 100%. Hal ini berarti bahwa realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 jumlah anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp2.830.446.750, sedangkan realisasi belanja operasi yang dikeluarkan adalah sebesar Rp2.666.076.075. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus rasio efisiensi belanja, diperoleh nilai rasio efisiensi sebesar 94,19%. Nilai rasio efisiensi sebesar 94,19% menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belanja yang tersedia telah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Berdasarkan kriteria tingkat efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun

1996, nilai tersebut termasuk dalam kategori kurang efisien. Hal ini disebabkan karena persentase penggunaan anggaran sangat mendekati 100%, sehingga menunjukkan bahwa pengeluaran yang dilakukan hampir menghabiskan seluruh anggaran yang tersedia.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh tingginya kebutuhan belanja operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun tersebut. Selain itu, adanya peningkatan biaya pelaksanaan kegiatan, kebutuhan operasional yang cukup besar, serta belum optimalnya pengendalian terhadap penggunaan anggaran juga dapat mempengaruhi tingginya realisasi belanja yang terjadi. Dengan demikian, meskipun kegiatan dapat terlaksana dengan baik, penggunaan anggaran pada tahun 2022 masih belum menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal.

Pada tahun 2023 jumlah anggaran belanja mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp2.190.276.100. Dari jumlah anggaran tersebut realisasi belanja operasi yang tercatat adalah sebesar Rp1.676.755.888. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus rasio efisiensi belanja, diperoleh nilai rasio efisiensi sebesar 76,55%. Nilai rasio efisiensi sebesar 76,55% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2023 lebih hemat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan kriteria tingkat efisiensi yang digunakan, persentase tersebut termasuk dalam kategori efisien karena realisasi belanja tidak terlalu mendekati batas maksimum anggaran yang tersedia.

Tingkat efisiensi yang lebih baik pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara lebih optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya perbaikan dalam proses perencanaan anggaran, peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana, serta adanya upaya pengendalian biaya dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik, instansi mampu melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan menggunakan anggaran yang lebih hemat.

Pada tahun 2024 jumlah anggaran belanja kembali mengalami penurunan menjadi Rp1.522.625.700. Dari jumlah anggaran tersebut realisasi belanja operasi yang dikeluarkan adalah sebesar Rp1.420.663.760. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus rasio efisiensi belanja, diperoleh nilai rasio efisiensi sebesar 93,30%. Nilai rasio efisiensi sebesar 93,30% menunjukkan bahwa sebagian besar

anggaran belanja yang tersedia telah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Berdasarkan kriteria tingkat efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini, nilai tersebut termasuk dalam kategori kurang efisien karena persentase penggunaan anggaran masih sangat tinggi dan mendekati 100%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 kembali meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut antara lain meningkatnya kebutuhan operasional, bertambahnya kegiatan yang harus dilaksanakan, dan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang digunakan dalam pelaksanaan program kerja. Hal tersebut menyebabkan realisasi belanja menjadi cukup besar sehingga tingkat efisiensi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi belanja selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan anggaran mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 rasio efisiensi tercatat sebesar 94,19% yang menunjukkan kondisi kurang efisien. Selanjutnya pada tahun 2023 rasio efisiensi menurun menjadi 76,55% sehingga menunjukkan kondisi efisien. Namun pada tahun 2024 rasio efisiensi kembali meningkat menjadi 93,30% yang menunjukkan kondisi kurang efisien. Perubahan nilai rasio efisiensi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum sepenuhnya stabil dari tahun ke tahun. Tahun 2023 merupakan tahun dengan tingkat efisiensi terbaik karena penggunaan anggaran lebih hemat dibandingkan dengan dua tahun lainnya. Sementara itu, pada tahun 2022 dan 2024 tingkat efisiensi masih tergolong kurang baik karena penggunaan anggaran masih sangat tinggi dan mendekati batas maksimal anggaran yang tersedia.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah mampu menggunakan anggaran di bawah batas 100% sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran, tingkat efisiensi penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih tepat, peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana, serta pengendalian biaya dalam pelaksanaan kegiatan agar penggunaan anggaran pada periode berikutnya dapat menjadi lebih efisien.

2) Analisis Rasio Kecerasingan Belanja

Rasio kecerasingan belanja merupakan Perhitungan rasio yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanjanya antara belanja operasi dan belanja modal. Rasio ini memberikan gambaran mengenai prioritas pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran apakah lebih difokuskan pada belanja yang bersifat operasional atau pada belanja yang mendukung pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana. Perhitungan rasio kecerasingan dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja operasi dan realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah dalam suatu periode tertentu. Semakin besar persentase belanja operasi, maka menunjukkan bahwa anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan operasional. Sebaliknya, semakin besar persentase belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih memprioritaskan anggaran untuk kegiatan pembangunan dan investasi jangka panjang.

Berikut ini hasil perhitungan rasio kecerasingan menunjukkan bagaimana komposisi penggunaan anggaran antara belanja operasi dan belanja modal Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY pada tahun 2022-2024 :

Tabel 4. 6 Analisis Rasio Kecerasingan/Aktivitas

Tahun	Belanja		Realisasi Belanja	Rasio	
	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Belanja Modal		Operasi	Modal
2022	2.666.076.075	-	2.666.076.075	100,00%	-
2023	1.676.755.888	498.019.300	2.174.775.188	77,10%	22,90%
2024	1.420.663.760	59.084.000	1.479.747.760	96,01%	3,99%

Sumber: LHP LK Biro PSDA Audited BPK, yang diolah

Berdasarkan tabel hasil analisis kecerasingan belanja pada tahun 2022 realisasi belanja operasi tercatat sebesar Rp2.666.076.075, sedangkan realisasi belanja modal pada tahun tersebut tidak tercatat atau tidak dialokasikan sehingga total realisasi belanja sebesar Rp2.666.076.075 seluruhnya berasal dari belanja operasi. Berdasarkan hasil perhitungan rasio kecerasingan diperoleh rasio belanja operasi sebesar 100,00%, sedangkan rasio belanja modal sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh anggaran yang

digunakan pada tahun tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional instansi dan tidak terdapat pengeluaran untuk pengadaan aset tetap atau kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang.

Persentase belanja operasi yang mencapai 100,00% menunjukkan bahwa seluruh anggaran yang direalisasikan pada tahun 2022 digunakan untuk kegiatan operasional. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih memprioritaskan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional dibandingkan dengan kegiatan pembangunan melalui belanja modal. Tidak adanya realisasi belanja modal pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun tersebut tidak terdapat pengeluaran yang dialokasikan untuk pengadaan aset tetap atau pembangunan infrastruktur. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fokus pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan operasional, keterbatasan anggaran yang tersedia, dan adanya kebijakan tertentu yang memprioritaskan kegiatan operasional dibandingkan dengan kegiatan investasi jangka panjang.

Pada tahun 2023 realisasi belanja operasi tercatat sebesar Rp1.676.755.888, sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp498.019.300. Dengan total realisasi belanja sebesar Rp2.174.775.188, maka diperoleh rasio belanja operasi sebesar 77,10% dan rasio belanja modal sebesar 22,90%. Rasio belanja operasi sebesar 77,10% menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih digunakan untuk kegiatan operasional. Namun demikian, pada tahun ini mulai terlihat adanya alokasi anggaran untuk belanja modal yang mencapai 22,90% dari total belanja. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mulai menyeimbangkan penggunaan anggaran antara kebutuhan operasional dan kegiatan pembangunan. Adanya alokasi belanja modal pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mulai mengarahkan sebagian anggaran untuk pengadaan aset tetap atau pembangunan fasilitas yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan belanja modal tersebut, diharapkan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik dapat lebih optimal.

Pada tahun 2024 realisasi belanja operasi tercatat sebesar Rp1.420.663.760, sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp59.084.000. Dengan total realisasi belanja sebesar Rp1.479.747.760 diperoleh rasio belanja operasi sebesar 96,01% dan rasio

belanja modal sebesar 3,99%. Persentase belanja operasi sebesar 96,01% menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran kembali difokuskan pada kegiatan operasional. Sementara itu, rasio belanja modal yang hanya sebesar 3,99% menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan atau pengadaan aset tetap pada tahun tersebut relatif kecil. Menurunnya rasio belanja modal pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa pemerintah daerah kembali memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kebutuhan operasional. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan operasional pada instansi, adanya program atau kegiatan yang memerlukan biaya operasional yang besar, dan adanya kebijakan penghematan anggaran untuk kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis rasio keserasian selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat diketahui bahwa komposisi penggunaan anggaran masih didominasi oleh belanja operasi. Pada tahun 2022 rasio belanja operasi mencapai 100,00% dan belanja modal sebesar 0%. Selanjutnya pada tahun 2023 rasio belanja operasi menurun menjadi 77,10%, sedangkan rasio belanja modal meningkat menjadi 22,90%. Namun pada tahun 2024 rasio belanja operasi kembali meningkat menjadi 96,01% dan rasio belanja modal menurun menjadi 3,99%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran antara belanja operasi dan belanja modal masih belum stabil dari tahun ke tahun. Secara umum, penggunaan anggaran masih lebih banyak difokuskan pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi dibandingkan dengan belanja modal untuk kegiatan pembangunan. Tingginya proporsi belanja operasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan operasional dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, rendahnya proporsi belanja modal menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset masih relatif kecil. Secara keseluruhan, hasil analisis rasio keserasian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran masih didominasi oleh belanja operasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan peningkatan alokasi belanja modal agar pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih optimal pada periode berikutnya.

3) Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

Perhitungan rasio pertumbuhan belanja dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja pada tahun berjalan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Selisih antara kedua nilai tersebut kemudian dibagi dengan realisasi belanja tahun sebelumnya dan dikalikan dengan 100%. Apabila nilai rasio pertumbuhan bernilai positif maka menunjukkan adanya peningkatan belanja dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, apabila nilai rasio pertumbuhan bernilai negatif maka menunjukkan bahwa realisasi belanja pada tahun tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam penelitian ini, analisis rasio pertumbuhan belanja dilakukan berdasarkan data realisasi belanja pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Berikut ini Hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja menunjukkan adanya perubahan nilai realisasi belanja setiap tahunnya :

$$\text{Tahun 2022} = \frac{2.666.076.075 - 7.717.215.022}{7.717.215.022} \times 100\% = -65,45\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{2.174.775.188 - 2.666.076.075}{2.666.076.075} \times 100\% = -18,43\%$$

$$\text{Tahun 2024} = \frac{1.479.747.760 - 2.174.775.188}{2.174.775.188} \times 100\% = -31,96\%$$

Tabel 4. 7 Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

Tahun	Realisasi Belanja	Pertumbuhan Belanja	Rasio Pertumbuhan Belanja
2021	7.717.215.022		
2022	2.666.076.075	-5.051.138.947	-65,45%
2023	2.174.775.188	-491.300.887	-18,43%
2024	1.479.747.760	-695.027.428	-31,96%

Sumber: LHP LK Biro PSDA Audited BPK, yang diolah

Berdasarkan data yang diolah, realisasi belanja pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp7.717.215.022. Pada tahun 2022 realisasi belanja mengalami penurunan menjadi

Rp2.666.076.075. Dengan menggunakan rumus rasio pertumbuhan belanja, maka pertumbuhan belanja tahun 2022 dihitung dengan membandingkan realisasi belanja tahun 2022 dengan realisasi belanja tahun 2021. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja pada tahun 2022 sebesar -65,45%. Nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi karena selisih antara realisasi belanja tahun 2022 dan tahun 2021 mencapai Rp5.051.138.947. Besarnya penurunan belanja pada tahun 2022 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya pengurangan anggaran pada beberapa program atau kegiatan, perubahan kebijakan dalam pengelolaan anggaran, maupun adanya penyesuaian terhadap prioritas belanja daerah. Penurunan ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2022 jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 realisasi belanja kembali mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi belanja pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp2.174.775.188, sedangkan realisasi belanja pada tahun 2022 sebesar Rp2.666.076.075. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai pertumbuhan belanja sebesar -18,43%. Nilai rasio pertumbuhan sebesar -18,43% menunjukkan bahwa realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan tersebut terjadi dengan selisih sebesar Rp491.300.887. Meskipun mengalami penurunan, nilai persentase penurunan pada tahun 2023 tidak sebesar penurunan yang terjadi pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi belanja masih mengalami penurunan, namun tingkat penurunannya relatif lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Situasi ini dapat disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap program kegiatan yang dilaksanakan, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta adanya pengendalian terhadap pengeluaran belanja daerah.

Pada tahun 2024 realisasi belanja tercatat sebesar Rp1.479.747.760. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2023 yang sebesar Rp2.174.775.188, maka terjadi penurunan realisasi belanja sebesar Rp695.027.428. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus rasio pertumbuhan belanja diperoleh nilai rasio pertumbuhan sebesar -31,96%. Nilai rasio pertumbuhan sebesar -31,96% menunjukkan bahwa realisasi belanja pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase penurunan pada tahun 2024 lebih besar

dibandingkan dengan tahun 2023, namun masih lebih kecil dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada tahun 2022. Penurunan realisasi belanja pada tahun 2024 dikarenakan adanya pengurangan alokasi anggaran, perubahan prioritas program kegiatan, maupun kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan total belanja yang direalisasikan pada tahun 2024 menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis rasio pertumbuhan belanja selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat diketahui bahwa realisasi belanja mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai rasio pertumbuhan belanja yang selalu bernilai negatif. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY selama periode tahun 2022-2024 mengalami tren penurunan. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam pengelolaan anggaran belanja yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penyesuaian kebijakan anggaran, pengurangan program kegiatan, maupun adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dengan demikian, analisis rasio pertumbuhan belanja ini memberikan gambaran bahwa perkembangan realisasi belanja dari tahun ke tahun masih mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun.

4) Analisis Rasio Varians (Selisih) Belanja

Rasio varians belanja merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan atau selisih antara anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan penggunaan anggaran sehingga realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang telah direncanakan. Apabila realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan maka kondisi tersebut disebut sebagai *favourable*, yang berarti penggunaan anggaran masih berada dalam batas yang direncanakan. Sebaliknya, apabila realisasi belanja melebihi anggaran yang telah ditetapkan maka kondisi tersebut disebut sebagai *unfavourable*, yang menunjukkan adanya pemborosan atau penggunaan anggaran yang melebihi rencana.

Berikut ini hasil perhitungan rasio varians belanja pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 4. 8 Analisis Rasio Varians (Selisih) Belanja

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Selisih	Rasio Varians Belanja	Keterangan
2022	2.830.446.750	2.666.076.075	164.370.675	5,81%	<i>favourable</i>
2023	2.190.276.100	2.174.775.188	15.500.912	0,71%	<i>favourable</i>
2024	1.522.625.700	1.479.747.760	42.877.940	2,82%	<i>favourable</i>

Sumber: LHP LK Biro PSDA Audited BPK, yang diolah

Berdasarkan tabel data diatas, pada tahun 2022 jumlah anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp2.830.446.750, sedangkan realisasi belanja yang terjadi adalah sebesar Rp2.666.076.075. Sesuai dengan data tersebut diperoleh selisih antara anggaran dan realisasi belanja sebesar Rp164.370.675. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan rasio varians belanja diperoleh nilai sebesar 5,81%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kondisi ini termasuk dalam kategori *favourable*, yang berarti bahwa penggunaan anggaran masih berada dalam batas yang telah direncanakan.

Pada tahun 2023 jumlah anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp2.190.276.100, sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp2.174.775.188. Berdasarkan data tersebut diperoleh selisih antara anggaran dan realisasi belanja sebesar Rp15.500.912. Hasil perhitungan rasio varians belanja menunjukkan nilai sebesar 0,71%. Nilai ini menunjukkan bahwa realisasi belanja hampir mendekati jumlah anggaran yang telah direncanakan. Kondisi ini juga termasuk dalam kategori *favourable* karena realisasi belanja masih berada di bawah jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Persentase varians yang relatif kecil yaitu 0,71% menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan pada tahun 2023 cukup akurat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sehingga selisih antara anggaran dan realisasi belanja menjadi sangat kecil.

Pada tahun 2024 jumlah anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.522.625.700, sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp1.479.747.760. Berdasarkan data tersebut diperoleh selisih antara anggaran dan realisasi belanja sebesar Rp42.877.940. Berdasarkan hasil perhitungan rasio varians belanja diperoleh nilai sebesar 2,82%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa realisasi belanja masih lebih kecil

dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan sehingga kondisi ini juga termasuk dalam kategori *favourable*. Persentase varians sebesar 2,82% menunjukkan bahwa masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan pada tahun tersebut. Dengan demikian, instansi melakukan pengelolaan anggaran pada tahun 2024 masih berjalan dengan baik karena adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil analisis rasio varians belanja selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat diketahui bahwa seluruh rasio varians belanja berada dalam kategori *favourable*. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja pada setiap tahun selalu lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY selama periode tahun 2022 sampai dengan 2024 telah dilakukan dengan baik karena realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi *favourable* yang terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa pengendalian terhadap penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, analisis rasio varians belanja memberikan gambaran bahwa perencanaan anggaran dan pelaksanaan belanja daerah telah berjalan dengan cukup baik serta mampu menjaga keseimbangan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi belanja yang terjadi. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan ketepatan dalam perencanaan anggaran agar selisih antara anggaran dan realisasi belanja dapat semakin diminimalkan pada periode berikutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun 2024, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan anggaran pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY selama periode 2022–2024 menunjukkan kondisi yang baik. Dapat dilihat dari nilai varians belanja yang menunjukkan kondisi *favourable*. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan, khususnya terkait dengan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta keseimbangan alokasi antara belanja operasi dan belanja modal.
2. Berdasarkan analisis rasio efisiensi belanja, tingkat efisiensi penggunaan anggaran selama periode penelitian mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 rasio efisiensi sebesar 94,19% yang termasuk dalam kategori kurang efisien, sedangkan pada tahun 2023 rasio efisiensi menurun menjadi 76,55% sehingga termasuk dalam kategori efisien. Namun pada tahun 2024 rasio efisiensi kembali meningkat menjadi 93,30% yang menunjukkan kondisi kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan agar lebih efisien pada periode berikutnya.
3. Berdasarkan analisis rasio keserasian belanja, komposisi penggunaan anggaran pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Pada tahun 2022 seluruh anggaran digunakan untuk belanja operasi sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2023 belanja operasi sebesar 77,10% dan belanja modal sebesar 22,90%. Selanjutnya pada tahun 2024 belanja operasi kembali meningkat menjadi 96,01% dan belanja modal menurun menjadi 3,99%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi

anggaran lebih difokuskan pada kebutuhan operasional dibandingkan dengan kegiatan pembangunan atau investasi jangka panjang.

4. Berdasarkan analisis rasio pertumbuhan belanja, realisasi belanja pada Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY selama periode penelitian menunjukkan tren penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rasio pertumbuhan belanja yang bernilai negatif setiap tahunnya, yaitu sebesar -65,45% pada tahun 2022, -18,43% pada tahun 2023, dan -31,96% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan alokasi maupun realisasi belanja yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran maupun perubahan prioritas program kegiatan.
5. Berdasarkan analisis rasio varians belanja, realisasi belanja pada setiap tahun selalu lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sehingga seluruhnya berada dalam kategori favourable. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan dengan baik karena tidak terjadi pemborosan anggaran serta terdapat pengendalian yang baik terhadap penggunaan anggaran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan melakukan perencanaan anggaran yang lebih tepat serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga penggunaan anggaran dapat lebih optimal.
2. Instansi diharapkan dapat mempertimbangkan peningkatan alokasi belanja modal agar keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal dapat tercapai sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan publik.
3. Dalam penyusunan anggaran pada periode berikutnya, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan ketepatan dalam perencanaan anggaran agar selisih antara anggaran dan realisasi belanja dapat semakin diminimalkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan periode penelitian yang lebih panjang atau menggunakan metode analisis yang lebih beragam sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, R., Arief, K., & Ishak, J. F. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 52–62.
- Dien, A. N. J., Walandouw, S., & Tinangon, J. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).
- Dona, E. meiliya, & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 135–144.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Pustaka Setia.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Laporan Realisasi Anggaran*.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). STIM YKPN.
- Mangar, A. B., Anakotta, F. M., & Kalau, A. A. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 2(1).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Noordiawan, D., & Hertianti, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Patih, S., Indika, M., & Talia, I. (2022). Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan

- Anak Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*.
- Prayuda, Y. W., & Arifin, J. (2024). *Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Vol. 6).
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Rukayah, R., Kusumawati, N., & Afriani, R. I. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi*, 4(2).
- Sabono, H. Y., & Sahusilawane, W. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran dalam Mengukur Kinerja Keuangan Desa. *Journal of Student Research*, 2(1), 326–336. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i1.2647>
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63–78.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Kas Pengeluaran pada dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

3400/06-0/005476 lup 1pa 110 12015

LEMBAR : VIII/VVV

Terima dan
Uang sebesar
Yaitu untuk pembayaran

BUKTI KAS PENGELUARAN

Biro Perencanaan dan BDA Benda DIY
Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas AB 43 sebesar Rp 5.200.000,-
Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
dengan rincian terlampir

Terbilang : Rp. 5.200.000,-

Mengetahui dan menyetujui
Kuasasa Penguasa Anggaran

ELINSY PRASWANTO, S.E., M.M.
NIP. 19690604 199303 2 007

Bersang telahgetut sudah diterima
dengan cukup dan baik

Bendahara

NUR FITRI ANTORO, SE
NIP. 19850619 201502 1 002

Telah dipungut :
PPH Rp.
PPH Rp.

Telah dibukukan : 610 2025
BK Tgl.
No. Rek. 5.1.02.01.01.0004
Kode Kegiatan 4.01.01.1.09.0001
Kode Program 4.01.01.1.09
Tahun Anggaran 2025

Nama & No. Rek. Penerima	Jumlah Transfer	Jumlah Pajak	
PT. Dianparamita Utama, Bank BPD DIY, No. Rek. 006.111.001621	5.200.000,00	PPN : 00,00 PPH 22 : 00,00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas AB 43 sebesar Rp 5.200.000,-

Lampiran 2. Nota/struk pembelian BBM untuk rekapitulasi pengeluaran belanja.

RODA 2 / MOTOR
AB 2377 IS

SPBU 44.551.09
JL. KUSUMANEGARA NO. 45
YOGYAKARTA
Telp. 0274 - 588972

Kamis, 27 Februari 2025 12:56:02

No. Mota : 03.04.23734
Jenis BBM : PERTAMAX 92
Harga/liter : Rp. 12.900
Liter : 3,101
Total : Rp. 40.000

Tunai : Rp. 40.000
Kembali : Rp. 0000

Mopol : AB2377IS
Kilometer : 0
Terimakasih dan Selamat jalan

SPBU 44.551.09
JL. KUSUMANEGARA NO. 45
YOGYAKARTA
Telp. 0274 - 588972

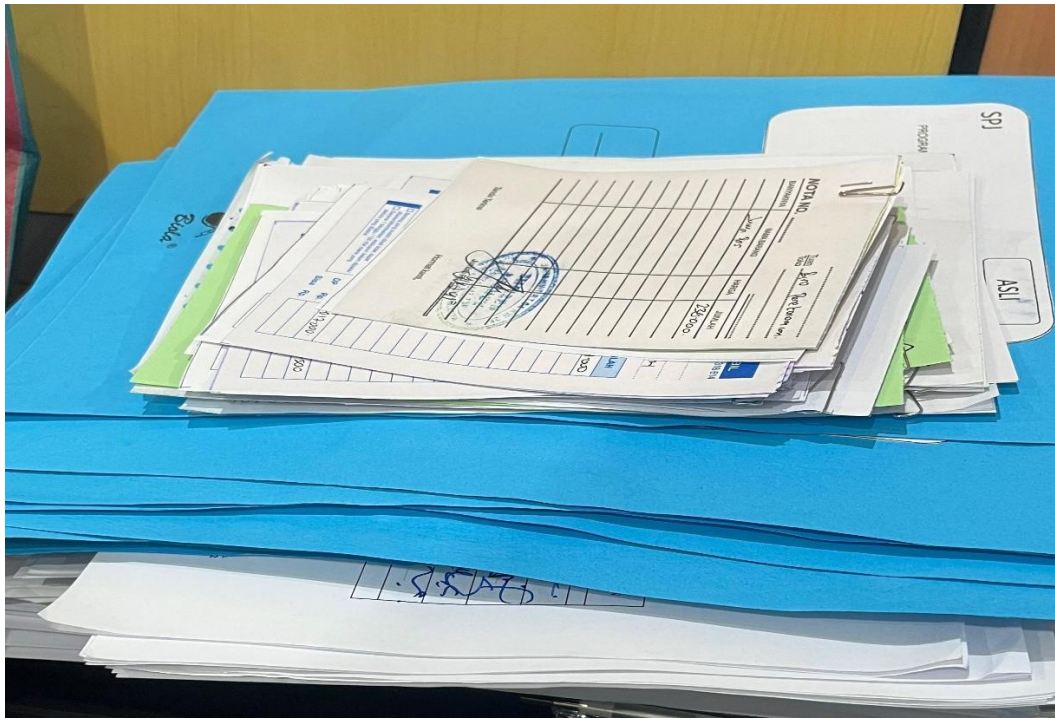
Kamis, 27 Februari 2025 12:53:31

No. Mota : 03.04.21730
Jenis BBM : PERTAMAX 92
Harga/liter : Rp. 12.900
Liter : 1,050
Total : Rp. 20.000

Tunai : Rp. 20.000
Kembali : Rp. 0000

Mopol : AB2377IS
Kilometer : 0
Terimakasih dan Selamat jalan

Lampiran 3. Kumpulan Dokumen SPJ yang akan disusun dan dikualifikasi



Lampiran 4. Tempat seluruh dokumen arsip yang di simpan pada ruang khusus pengarsipan



Lampiran 5. Tampilan LRA Biro PSDA Setda DIY pada Excel

05 LRA sesuai format

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help Nitro Pro

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Add-ins

Comments Share

AH48

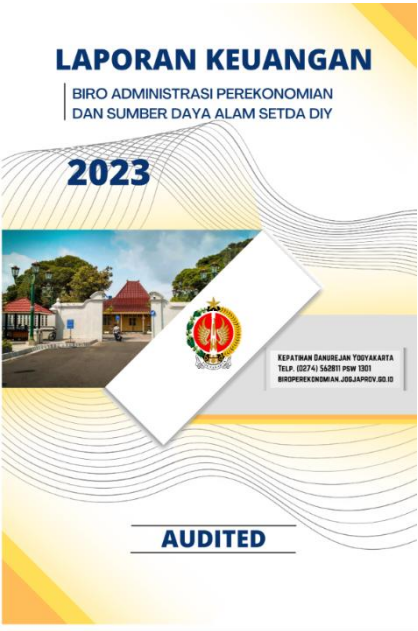
PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
MINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D
TAHUN ANGGARAN 2024
31 Desember 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
3	4	5	6 = (4/3) * 100	8
PENDAPATAN	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-
BELANJA	1.522.625.700	1.479.747.700	97,18	2.174.775.188
BELANJA	1.457.725.700	1.420.863.700	97,46	1.676.755.888
Belanja Pegawai	34.400.000	36.400.000	105,82	42.360.000
Belanja Barang	1.419.325.700	1.382.263.700	97,39	1.534.395.888
JUMLAH	1.457.725.700	1.420.863.700	97,46	1.676.755.888
BELANJA	64.900.000	59.884.000	91,04	498.619.300
Belanja Modal	64.900.000	59.884.000	91,04	498.619.300
JUMLAH	64.900.000	59.884.000	91,04	498.619.300
BELANJA	1.522.625.700	1.479.747.700	97,18	2.174.775.188
SURPLUS/DEFISI	(1.522.625.700)	(1.479.747.700)	97,18	(2.174.775.188)

Yogyakarta, 31 Desember 2024
KEPALA BIRO
MINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
ELING PRISWANTO, SE, MM
NP 197602232008041003

Per Jenis LRA

Lampiran 6. File Dokumen Laporan Keuangan



Secara ringkas Laporan Keuangan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY tahun anggaran 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

Pendapatan:	
Anggaran	Rp 0
Realisasi	Rp 0
Selisih lebih dari anggaran	Rp 0

Belanja:	
Anggaran	Rp 2.190.276.100
Realisasi	Rp 2.174.775.188
Selisih kurang dari anggaran	Rp 15.500.912
Atau	99,29%